

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syukri Akub & Baharudin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gamma Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya & Hasan Madani, 2017, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2014, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soediman Kartohadiprodjo, 1996, *Indonesia Negara Hukum*, Seruling Masa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

JURNAL

Bahrn, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 2017.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Tahun (tidak disebut), hlm. 65.

Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi & Alpi Sahari, “Perlindungan Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas pada Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 14, No. 2, 2022.

Harmaji Riswinarno & Teguh Suratman, “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1 Juni 2018.

Jessica, *Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Dikepolisian Daerah Sumatera Utara*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.3 Tahun 2022.

Mukhils R., “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum Pekanbaru*, Vol. III, No. 1, 2010.

Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 3, 2017.

Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar & Tri Imam Munandar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Suswantoro, Slamet Suhartono & Fajar Sugianto, “Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. I, No. 1 Agustus 2018.

WEBSITE

Anggi Muliawati, “Rapat di DPR, Ikadin Usul Batasi Penyidikan 2 Tahun dan Pemeriksaan 8 Jam”, <http://www.Detik.com>, dikunjungi pada tanggal 25 Juli 2025 jam 11.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana – Pasal 1 Angka 2 dan Angka 14.

WAWANCARA

Wawancara dengan IPDA Admi Pandowita, Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat, 1 Juli 2025.

Wawancara dengan IPTU Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K., Kasatreskrim Polres Pasaman Barat, 1 Juli 2025.

Wawancara dengan Abdul Hamid, S.H., M.H., Pasaman Barat, 1 Juli 2025.

